

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Kompetensi Aparatur Terhadap *Good Governance* Pada Dana Kelurahan di Tingkat Kecamatan

Anggy Saskia^{1*}, Ade Budi Setiawan², Saepul Anwar³
^{1,2,3}Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

*Corresponding Author: c.2110543@unida.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 16/06/2025
Diterima, 10/07/2025
Dipublikasi, 21/07/2025

Kata Kunci:

Transparansi,
Akuntabilitas,
Kompetensi Aparatur,
Good Governance,
Dana Kelurahan,
Kecamatan Cibodas.

Keywords:

Transparency,
Accountability,
Apparatus Competence,
Good Governance,
Urban Village Funds,
Cibodas District

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi aparatur terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *sampling* jenuh serta jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer. Sampel penelitian ini sebanyak 50 orang pegawai di 6 kelurahan pada Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner atau angket kepada responden. Teknis analisis dan uji hipotesis menggunakan alat *Partial Least Square* (PLS) dengan memakai *software* aplikasi *SmartPLS* 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* pada dana Kelurahan di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.

Abstract

This study aims to analyze the effect of transparency, accountability, and apparatus competence on the application of good governance principles in the management of urban village funds in Cibodas District, Tangerang City. The research method used is quantitative. The sampling technique used is saturated sampling and the type of data in this study is primary data. The sample of this research was 50 employees in 6 urban villages in Cibodas District, Tangerang City. The data collection technique used in this study was through distributing questionnaires or questionnaires to respondents. Technical analysis and hypothesis testing using Partial Least Square (PLS) tools using SmartPLS 3.0 application software. The results showed that transparency, accountability, and apparatus competence had a positive and significant effect on good governance in urban village funds in Cibodas District, Tangerang City.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan fondasi kehidupan masyarakat modern dan sangat penting dalam berbagai aspek. Di era globalisasi dan informasi, pemerintah menghadapi tanggung jawab yang semakin kompleks, menuntut peningkatan kinerja aparatur demi pelayanan yang optimal (Gamal, 2019). Pelayanan publik adalah wujud pemenuhan hak-hak dasar warga atas barang, jasa, dan administrasi. Pemerintah Daerah dan BUMD bertanggung jawab atas penyediaannya, sedangkan masyarakat berperan sebagai penerima dengan hak dan kewajiban (Jayanti, 2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar yuridis pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, bertujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Dinamika pembangunan menuntut perubahan signifikan dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih demokratis, efisien, responsif, serta mampu merumuskan kebijakan yang menjamin HAM dan keadilan sosial. Sementara itu, masyarakat diharapkan semakin sadar hak dan kewajiban, terinformasi, solidaris, aktif dalam urusan publik, dan mampu berinteraksi konstruktif dengan lembaga publik. (Kasenda et al., 2012).

Kelurahan, sebagai bagian dari Kecamatan, berperan penting dalam pemerintahan tingkat dasar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Keuangannya bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, serta bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan pihak ketiga. Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan bahwa anggaran pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dialokasikan melalui APBD dan masuk dalam anggaran Kecamatan. Dana Kelurahan juga dialokasikan minimal 5% dari APBD setelah dikurangi DAK, dan paling sedikit setara dengan alokasi dana desa terendah di wilayah tersebut (Kasenda et al., 2012).

Dalam rangka pengelolaan dana kelurahan yang efektif, Pemerintah Pusat menerbitkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan. Peraturan ini mengatur pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan. Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa DAU tambahan ditujukan untuk membiayai pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sedangkan huruf b menekankan peningkatan kapasitas masyarakat melalui potensi dan sumber daya lokal (Pattylima et al., 2018). DAU tambahan dialokasikan oleh Kementerian Keuangan melalui DJPK sebagai dukungan bagi kelurahan, dengan pengelompokan berdasarkan kualitas pelayanan publik dalam kategori “Baik”, “Perlu Ditingkatkan”, dan “Sangat Perlu Ditingkatkan” (<https://ekbis.sindonews.com>).

Namun, realisasi anggaran di beberapa kecamatan di Kota Tangerang masih menghadapi kendala, termasuk di Kecamatan Cibodas.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Per Kecamatan Di Kota Tangerang Tahun 2024

Uraian	Pagu 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Kecamatan Batu Ceper	33.575.618.811	16.993.390.325	16.853.462.190	50,21
Kecamatan Benda	27.333.463.919	13.133.807.318	14.199.656.601	48,05
Kecamatan Tangerang	39.575.618.811	18.858.990.856	20.716.627.955	47,65
Kecamatan Cipondoh	46.405.142.921	23.086.364.941	23.318.777.980	49,75
Kecamatan Cibodas	34.636.738.482	17.169.026.999	17.467.711.483	49,57
Kecamatan Ciledug	36.676.457.708	18.620.668.405	18.055.789.303	50,77
Kecamatan Larangan	35.412.971.169	17.588.514.403	17.824.456.766	49,67
Kecamatan Karang Tengah	33.191.771.409	14.155.853.360	19.035.918.049	42,65
Kecamatan Neglasari	32.501.317.984	14.788.521.797	17.712.796.187	45,50
Kecamatan Karawaci	58.135.694.051	30.325.667.903	27.810.026.148	52,16
Kecamatan Jatiuwung	31.859.877.743	14.659.939.058	17.199.938.685	46,01
Kecamatan Pinang	46.871.436.610	23.756.053.494	23.115.383.116	50,68
Kecamatan Periuk	31.260.363.680	15.179.145.692	16.081.217.988	48,56

Sumber: PPID Kota Tangerang, 2025

Berdasarkan data realisasi anggaran per kecamatan di Kota Tangerang tahun 2024 Tabel 1, Kecamatan Cibodas dengan pagu anggaran sebesar Rp34.636.738.482 hanya merealisasikan Rp17.169.026.999 atau 49,57%. Angka ini menempatkan Kecamatan Cibodas di posisi tengah dibandingkan kecamatan lain dan mengindikasikan perlunya kajian lebih mendalam terkait efektivitas pengelolaan dana, khususnya dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi

aparatur. Pemilihan Kecamatan Cibodas sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada minimnya penelitian terkait *good governance* dana kelurahan di wilayah tersebut, serta adanya kasus penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi, seperti penetapan tersangka korupsi terhadap Lurah Cibodasari pada tahun 2012 yang menyewakan lahan kelurahan tanpa masuk kas negara (<https://megapolitan.kompas.com>). Fenomena ini menegaskan bahwa dana kelurahan, seperti halnya dana desa, sangat rentan terhadap praktik korupsi. Laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat 721 kasus korupsi dana desa dengan 1.072 tersangka dalam kurun waktu 2019-2023, menyoroti urgensi tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah penyimpangan dan memastikan dana benar-benar memenuhi kepentingan masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan, yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211 Tahun 2022 dan PMK Nomor 212 Tahun 2022, dialokasikan sebesar Rp200 juta per kelurahan pada tahun 2023 dan berlanjut di APBN 2024. Dana ini bertujuan mendukung pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pelayanan sosial dasar. Transparansi penggunaan dana kelurahan, termasuk alokasi dan jumlahnya, harus diketahui oleh masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna mengurangi potensi penyalahgunaan (Kasenda et al., 2012). Meskipun demikian, data realisasi penggunaan DAU untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat tahun 2024 di enam kelurahan Kecamatan Cibodas

Tabel 1. Data Realisasi Penggunaan DAU Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024 Kecamatan Cibodas Kota Tangerang

No.	Kelurahan	Target	Realisasi	%
1	Panunggaran Barat	Rp. 200.000.000	Rp. 166.500.000	83,25
			Rp. 33.500.000	16,75
2	Cibodasari	Rp. 200.000.000	Rp. 166.500.000	83,25
			Rp. 33.500.000	16,75
3	Cibodas Baru	Rp. 200.000.000	Rp. 166.500.000	83,25
			Rp. 33.500.000	16,75
4	Cibodas	Rp. 200.000.000	Rp. 135.300.000	67,65
			Rp. 64.700.000	32,35
5	Uwung Jaya	Rp. 200.000.000	Rp. 150.900.000	75,45
			Rp. 49.100.000	24,55
6	Jatiuwung	Rp. 200.000.000	Rp. 166.500.000	83,25
			Rp. 33.500.000	16,75

Sumber: Kantor Kelurahan di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, 2025

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan adanya variasi. Sebagian besar kelurahan menunjukkan realisasi yang konsisten, namun Kelurahan Cibodas dan Uwung Jaya memiliki realisasi yang lebih rendah. Variasi ini dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program, kurangnya akuntabilitas, atau keterbatasan kompetensi aparatur dalam mengelola dana secara efektif. Perbedaan ini menegaskan bahwa pencapaian *good governance* dalam pengelolaan dana kelurahan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana transparansi informasi anggaran, akuntabilitas pertanggungjawaban, serta kompetensi aparatur dalam perencanaan dan implementasi program di masing-masing kelurahan.

Berdasarkan fenomena dan urgensi yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah kelurahan setempat agar sasaran kebijakan dan pelayanan publik tercapai secara optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana kelurahan, kebijakan publik dapat memberikan manfaat signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul "**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Aparatur Terhadap Good Governance Pada Dana Kelurahan di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang (Studi Kasus Pada Kelurahan Di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang)**".

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory

Stewardship Theory

Stewardship Theory mengasumsikan bahwa manajer (aparatur) bertindak demi kepentingan terbaik organisasi dan pemangku kepentingan, bukan demi keuntungan pribadi (Donaldson & Davis dalam Rizal & Hermanto, 2019). Dalam konteks pemerintahan, teori ini menekankan bahwa pemerintah desa/kelurahan dapat dipercaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Implikasinya, pemerintah desa/kelurahan diharapkan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Rizal & Hermanto, 2019). Teori ini relevan dalam penelitian sektor publik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pengendalian, dan responsivitas (Syahara et al., 2024).

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik untuk tujuan pertanggungjawaban keuangan (Renyowijoyo & AK., MM., 2012). Tujuannya meliputi akuntabilitas (menyediakan informasi keuangan untuk pertanggungjawaban), manajerial (membantu penyusunan anggaran dan strategi pembangunan), dan pengawasan (pemeriksaan keuangan dan kepatuhan) (Hasanah & Fauzi, 2017). Akuntansi sektor publik juga bertujuan untuk mencapai kontrol manajemen yang efisien dan ekonomis dalam penggunaan sumber daya publik, serta melaporkan operasi dan anggaran kepada publik (Rahmayanti et al., 2024). Organisasi sektor publik memiliki sifat non-laba dengan tujuan memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber dana berasal dari publik dan tidak mengharapkan pengembalian. Lingkungan yang memengaruhi sektor publik sangat kompleks, melibatkan faktor ekonomi, politik, kultural, dan demografi (Renyowijoyo & AK., MM., 2012).

Good Governance

Good governance adalah konsep pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima masyarakat (Kusumasari et al., 2015). Ini melibatkan proses perencanaan dinamis, korelasi antar-institusi, dan hubungan baik antara pemerintah dengan sektor publik. *Good governance* berfokus pada pengelolaan urusan publik, termasuk sumber daya ekonomi dan sosial, untuk kepentingan pembangunan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Menurut Menurut *United Nation development Programme* dalam penelitian Trisno et al., (2017) Faktor-faktor yang memengaruhi *good governance* dalam pengelolaan dana kelurahan meliputi partisipasi, akuntabilitas, aturan hukum, transparansi, daya tangkap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, dan visi strategis. Menurut Menurut Nubatonis et al., (2015) dalam penelitian Supit & Lumingkewas (2023) dan dalam Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi, pelayanan prima, efektivitas dan efisien, supremasi hukum.

Pengelolaan Dana Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah administratif terendah di bawah kecamatan yang berfungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Assa et al., 2020). Pengelolaan diartikan sebagai manajemen, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan (SEMPO et al., 2020). Dana kelurahan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan dari pemerintah pusat untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (Kemenkeu.go.id dalam Hariadin & Rais, 2022). Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana kelurahan termasuk dominasi perangkat daerah, kualitas SDM, perubahan struktur organisasi, ketidaktepatan pemahaman perencanaan, serta kurangnya transparansi dan penyebaran informasi (Rahman, 2022). Indikator pengelolaan dana kelurahan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Qak & Holifah, 2024).

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi secara lengkap, tepat waktu, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (Putri & Maryono, 2022 dalam Fadillah & Sembiring, 2023). Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi keuangan desa/kelurahan secara luas (Juwanti et al., 2022). Mardiasmo (2018) menyebutkan transparansi ditandai oleh pemberian informasi yang jelas, keterbukaan akses publik, dan pelaporan kinerja keuangan. Indikatornya meliputi informasi yang mudah dipahami, publikasi kegiatan dan keuangan, serta laporan yang dapat diakses secara berkala (Qak & Holifah, 2024).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan pencapaian atau kegagalan organisasi secara berkala (Qak & Holifah, 2024). Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah. Terdapat dua jenis akuntabilitas: akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi) dan akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban kepada masyarakat luas). Indikator akuntabilitas meliputi kesesuaian pelaksanaan dengan standar prosedur, adanya sanksi atas kesalahan/kelalaian, dan terukurnya *output* dan *outcome* (Qak & Holifah, 2024).

Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur desa/kelurahan mengacu pada efektivitas dan efisiensi staf dalam melaksanakan tugas, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan (Masruni & Kaukab, 2019). Aparatur yang kompeten merupakan kontributor penting dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan (Viani & Jaeni, 2024). Indikator kompetensi aparatur desa/kelurahan meliputi kemampuan melaksanakan tugas keuangan, pemahaman pengelolaan keuangan, partisipasi dalam pelatihan teknis, inisiatif dalam pekerjaan, dan sikap berdasarkan kode etik pegawai (Nurkhasanah, 2019).

METODE

Objek penelitian ini berfokus pada hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi aparatur dengan *good governance* dana kelurahan di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, yang mencakup enam kelurahan. Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kuantitatif untuk menguji sejauh mana variabel independen (transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi aparatur) memengaruhi variabel dependen (*good governance*). Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menganalisis data statistik dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Transparansi (X ₁)	Transparansi merupakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi secara lengkap, terbuka, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (Putri & Maryono, 2022 dalam Fadillah & Sembiring, 2023).	1. Informasi mudah diakses dan dipahami 2. Publikasi kegiatan dan keuangan 3. Laporan berkala yang dapat diakses publik (Qak & Holifah, 2024)	Ordinal
Akuntabilitas (X ₂)	Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang diberi amanah untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada pihak yang memberi amanah (Mardiasmo, 2018).	1. Kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur 2. Adanya sanksi atas kesalahan/kelalaian 3. Output dan outcome terukur (Qak & Holifah, 2024)	Ordinal
Kompetensi Aparatur (X ₃)	Kompetensi aparatur desa/kelurahan mencakup kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan dan pemerintahan desa (Masruni & Kaukab, 2019).	1. Kemampuan 2. Pemahaman 3. Pelatihan teknis 4. Inisiatif kerja 5. Kode etik kepegawaian (Nurkhasanah, 2019)	Ordinal
<i>Good Governance</i> (Y)	<i>Good governance</i> adalah tata kelola urusan publik dan sumber daya sosial-ekonomi demi pembangunan masyarakat (Mardiasmo, 2018).	1. Profesionalitas 2. Akuntabilitas 3. Transparansi 4. Pelayanan Prima 5. Demokrasi dan Partisipasi 6. Efisiensi dan Efektivitas 7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (PP No. 101 Tahun 2000)	Ordinal

Sumber: Data primer diolah (2025)

Populasi penelitian melibatkan 50 pegawai pemerintah di 6 kelurahan (yaitu Kelurahan Panunggangan Barat, Cibodasari, Cibodas Baru, Cibodas, Uwung Jaya, dan Jatiuwung) di Kecamatan Cibodas. Metode pengambilan sampel jenuh (*non-probability sampling*) digunakan, di mana seluruh populasi dijadikan sampel. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen relevan. Kuesioner menggunakan skala *Likert* ordinal yang kemudian diubah menjadi skala interval untuk analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data yang terkumpul tanpa generalisasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS) dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS 3.0*. Analisis data diawali dengan pengelompokan dan tabulasi data berdasarkan variabel dan responden, kemudian disajikan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Pendekatan SEM PLS dipilih karena kemampuannya dalam memodelkan variabel laten yang diukur melalui indikator. Berikut adalah tujuh langkah SOP dalam analisis SEM:

1. Merancang Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model digunakan untuk mengidentifikasi indikator yang merepresentasikan variabel laten. Setiap konstruk diukur dengan beberapa indikator reflektif yang terdiri atas item-item pernyataan yang saling berhubungan. Berikut gambaran umum *outer* model:

- Transparansi (ξ_1): 3 indikator, masing-masing dengan 2 item (total 6 item).

- Akuntabilitas (ξ_2): 3 indikator, masing-masing dengan 2 item (total 6 item).
- Kompetensi Aparatur (ξ_3): 5 indikator dengan total 6 item.
- *Good Governance* (η_1): 7 indikator dengan total 6 item.

Menurut Sugiyono (2014), satu indikator dapat diukur oleh beberapa item untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi pengukuran. Untuk konstruk reflektif, disarankan menggunakan beberapa item per indikator agar cakupan konsep lebih komprehensif (Hair et al., 2017).

2. Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis. Model ini dirancang untuk merepresentasikan struktur hubungan antara variabel-variabel tersebut. Rancangan model disusun berdasarkan masalah dan hipotesis penelitian.

3. Mengonstruksi Diagram Jalur

Diagram jalur menyajikan keseluruhan model penelitian, hasil integrasi antara inner dan outer model.

4. Konversi Diagram ke Persamaan

Diagram jalur dikonversi menjadi dua jenis persamaan:

- Outer model: Menghubungkan konstruk laten dengan indikator-indikatornya.
- Inner model: Menjelaskan hubungan antara variabel laten eksogen dan endogen.

Contoh persamaan inner model: η_1 (GG) = $\gamma_1\xi_1$ (TP) + $\gamma_2\xi_2$ (AB) + $\gamma_3\xi_3$ (KA) + ζ_1

5. Pemilihan Matriks Input dan Estimasi

SEM hanya menggunakan matriks varians dan korelasi sebagai input. Proses estimasi mencakup:

- 1) Estimasi bobot untuk skor variabel laten.
- 2) Estimasi jalur antar variabel laten dan indikator.
- 3) Estimasi mean dan lokasi parameter.

6. Evaluasi *Goodness of Fit*

1) Uji Model Pengukuran (Outer Model)

- Validitas Konvergen: Diukur melalui AVE ($>0,5$) dan outer loadings ($>0,7$).
- Validitas Diskriminan: Diukur melalui cross loading dan akar AVE yang harus lebih tinggi dari korelasi antar konstruk.
- Reliabilitas Komposit: Menilai konsistensi internal dengan nilai ideal $> 0,6$.

2) Uji Model Struktural (Inner Model)

- *R-Square*: Mengukur kekuatan pengaruh konstruk eksogen pada endogen (nilai 0,67 baik; 0,33 moderat; 0,19 lemah).
- *F-Square*: Menilai besar pengaruh laten eksogen pada endogen (0,02 kecil; 0,15 sedang; 0,35 besar).
- *Q-Square*: Mengukur relevansi prediktif model (>0 berarti relevan).
- *Path Coefficient*: Dilihat dari signifikansi koefisien jalur menggunakan metode *bootstrapping*.

7. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan menggunakan analisis jalur dan *bootstrapping*. Hipotesis diterima jika nilai t-statistik $>$ t-tabel (1,96 untuk $\alpha = 5\%$) dan p-value $<$ 0,05, yang menunjukkan pengaruh signifikan antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Hasil Penelitian

Pengujian outer model

Pengujian outer model bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa model yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Validitas model diuji melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan, sementara reliabilitas model dievaluasi dengan menggunakan nilai *composite reliability*.

Uji Validitas Data

Validitas Konvergen

Validitas konvergen merupakan bentuk validasi dalam model pengukuran yang dinilai melalui hubungan korelatif antara indikator reflektif dan konstruk yang diukur. Dalam pendekatan *Partial Least Squares* (PLS), validitas ini dapat dilihat dari nilai *loading factor*, di mana indikator dianggap valid apabila nilai loading-nya melebihi 0,7.

Tabel 4. *Loading Factor*

Variabel	Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Kesimpulan
Transparansi	TP1	0,845	0,7	Valid
	TP2	0,871	0,7	Valid
	TP3	0,876	0,7	Valid
	TP4	0,846	0,7	Valid
	TP5	0,826	0,7	Valid
	TP6	0,865	0,7	Valid
Akuntabilitas	AB1	0,778	0,7	Valid
	AB2	0,823	0,7	Valid
	AB3	0,791	0,7	Valid
	AB4	0,804	0,7	Valid
	AB5	0,726	0,7	Valid
	AB6	0,775	0,7	Valid
Kompetensi Aparatur	KA1	0,856	0,7	Valid
	KA2	0,877	0,7	Valid
	KA3	0,855	0,7	Valid
	KA4	0,866	0,7	Valid
	KA5	0,812	0,7	Valid
	KA6	0,878	0,7	Valid
<i>Good Governance</i>	GG1	0,910	0,7	Valid
	GG2	0,886	0,7	Valid
	GG3	0,902	0,7	Valid
	GG4	0,903	0,7	Valid
	GG5	0,898	0,7	Valid
	GG6	0,893	0,7	Valid

Sumber: Sumber: Data primer diolah (2025)

Validitas konvergen dapat dilihat dari nilai *loading factor* yang menunjukkan korelasi antara item dengan konstraknya, dengan batas minimal $> 0,7$. Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh 24 indikator memiliki *loading factor* antara 0,726 hingga 0,910, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan memenuhi kriteria validitas konvergen.

Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 5. Hasil Pengujian *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel Laten	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
Transparansi	0,731
Akuntabilitas	0,614

Kompetensi Aparatur	0,735
<i>Good Governance</i>	0,808

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4 seluruh nilai AVE masing-masing konstruk melebihi 0,5, yang menunjukkan bahwa indikator yang digunakan telah memenuhi uji validitas konvergen dan diskriminan. Nilai AVE tertinggi terdapat pada konstruk *Good Governance* (0,808), sementara yang terendah pada Akuntabilitas (0,614).

Uji Reabilitas *Composite Reability*

Tabel 6. *Composite Reability*

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reability</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Kesimpulan
Transparansi	0,926	0,944	0,7	Reliabel
Akuntabilitas	0,877	0,905	0,7	Reliabel
Kompetensi Aparatur	0,928	0,943	0,7	Reliabel
<i>Good Governance</i>	0,952	0,962	0,7	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 6 diatas, nilai *output* dari *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* untuk konstruk transparansi, akuntabilitas, kompetensi aparatur, serta *good governance* seluruhnya berada di atas angka 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel tersebut tergolong reliabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Analisis Inner Model Analisis Varian (R^2)

Tabel 7. Hasil Pengujian Kontribusi (R^2)

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
<i>Good Governance</i>	0,901	0,894

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 7 diperoleh nilai *R-Square* sebesar 0,901 yang artinya model regresi memiliki tingkat *goodness-fit* yang baik yang berarti variabilitas *good governance* yang dapat dipengaruhi oleh ketiga variabel dalam model yaitu transparansi, akuntabilitas dan kompetensi aparatur sebesar 90,1%, sedangkan sisanya 9,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya. sehingga dapat disimpulkan bahwa *R-Square* variabel *good governance* masuk ke dalam kategori baik karena lebih dari 0,67.

F-Square

Tabel 8. Hasil Pengujian *F-Square*

	<i>F-Square</i>	Besarnya Pengaruh
Transparansi -> <i>Good Governance</i>	0,307	Sedang
Akuntabilitas -> <i>Good Governance</i>	0,145	Kecil
Kompetensi Aparatur -> <i>Good Governance</i>	0,664	Besar

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 8 *F-Square* menilai *effect size* model. Nilai *F-Square* yang *effect size* besar dengan kriteria *F-Square* > 0,35 sebesar 0,664 adalah pengaruh kompetensi aparatur terhadap *Good Governance*. Dan pengaruh Transparansi terhadap *Good Governance* termasuk kategori sedang, dengan nilai *F-Square* sebesar 0,307 lebih dari 0,15 tetapi kurang dari 0,35.

Sedangkan pengaruh Akuntabilitas terhadap *Good Governance* termasuk dalam kategori kecil dikarenakan nilai *F-Square* sebesar 0,145 lebih dari 0,02 tetapi kurang dari 0,15.

Evaluasi Nilai *Q-Square* (Q^2)

Tabel 9. Hasil Pengujian *Construct Cross-Validate Redudancy* (Q^2)

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$	Fit Model
<i>Good Governance</i>	300.000	85.802	0,714	Kuat

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 9 hasil *blindfolding* menunjukkan prediksi eksogen yang mempengaruhi *good governance* adalah kuat. Prediksi relevansi model fit konstruk *good governance* ($Q^2 = 0,714$), yang menunjukkan tingkat validitas yang baik atau kuat terhadap kesesuaian model karena nilai Q^2 diatas 0,35.

Evaluasi Estimasi Signifikansi

Dari hasil evaluasi estimasi signifikan (*evaluation of precision of estimation*), bisa menjawab hipotesis nol yang diajukan apakah diterima atau ditolak. Dari evaluasi *model structural* melalui prosedur *bootstrapping* seperti yang ditunjukkan oleh tabel 16 maka hasil uji pengolahan sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Pengujian *Path Coefficiencies*

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Stansard Deviation</i>	<i>T-statistic</i>	<i>P-Values</i>
Transparansi -> <i>Good Governance</i>	0,348	0,347	0,134	2,607	0,009
Akuntabilitas -> <i>Good Governance</i>	0,172	0,168	0,077	2,224	0,027
Kompetensi Aparatur -> <i>Good Governance</i>	0,502	0,505	0,131	3,843	0,000

Sumber: Data primer diolah (2025)

a. Hubungan X1-Y (Transparansi terhadap *Good Governance*):

Koefisien sebesar 0,348 menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*. Nilai T hitung 2,607 > 1,96 dan P-Value 0,009 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, semakin tinggi transparansi, semakin baik penerapan *good governance* pada dana kelurahan di Kecamatan Cibodas.

b. Hubungan X2-Y (Akuntabilitas terhadap *Good Governance*):

Koefisien 0,172 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas terhadap *good governance*. Dengan T hitung 2,224 > 1,96 dan P-Value 0,027 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, peningkatan akuntabilitas turut meningkatkan *good governance* dana kelurahan di Kecamatan Cibodas.

c. Hubungan X3-Y (Kompetensi Aparatur terhadap *Good Governance*):

Koefisien 0,502 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan kompetensi aparatur terhadap *good governance*. Nilai T hitung 3,843 > 1,96 dan P-Value 0,000 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti semakin tinggi kompetensi aparatur, semakin baik penerapan *good governance* dana kelurahan di Kecamatan Cibodas.

Pembahasan Hasil Pengujian

Pengaruh Transparansi terhadap *Good Governance*

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* dana kelurahan di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Dengan koefisien parameter 0,348, *t-statistik* 2,607 ($p=0,009$), hipotesis ini diterima,

menegaskan bahwa semakin tinggi transparansi, semakin baik penerapan *good governance*. Temuan ini sejalan dengan *Stewardship Theory*, di mana aparaturnya yang transparan dalam penyampaian informasi anggaran dan pelaksanaan program akan meningkatkan kepercayaan serta pengawasan masyarakat. Observasi lapangan menunjukkan kelurahan seperti Panunggaran Barat, Cibodasari, dan Jatiuwung memiliki praktik transparansi yang baik, terbukti dari realisasi anggaran yang konsisten dan ketersediaan informasi di situs web pemerintah. Namun, tantangan masih ada dalam memastikan informasi ini diakses dan dipahami merata oleh seluruh lapisan masyarakat, menggarisbawahi perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Viani & Jaeni (2024), Aulia, L. S., Setiawan, A. B., & Melani, M. M. (2023), Djamiraga & Widajantie (2022), Hindrayani & Wati (2021), dan Aditya & Widaryanti (2019).

Pengaruh Akuntabilitas terhadap *Good Governance*

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* dana kelurahan. Dengan koefisien parameter 0,172, *t-statistik* 2,224 ($p=0,027$), hipotesis ini terbukti. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas aparaturnya dalam pengelolaan dana secara jelas dan terukur berkorelasi positif dengan pencapaian *good governance*. Sejalan dengan *Stewardship Theory*, aparaturnya sebagai pelayan publik memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola dana secara transparan dan etis. Meskipun prosedur pelaporan telah dilaksanakan, masih terdapat kelemahan dalam publikasi laporan keuangan kepada masyarakat. Pemerintah kelurahan di Kecamatan Cibodas dinilai cukup baik dalam menerapkan berbagai bentuk akuntabilitas, termasuk aspek finansial, manajerial, dan kepatuhan hukum. Hasil ini didukung oleh studi terdahulu seperti Supit & Lumingkewas (2023), Juwanti dkk. (2022), Hindrayani & Wati (2021), dan Aditya & Widaryanti (2019).

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap *Good Governance*

Kompetensi aparaturnya juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* dana kelurahan. Dengan koefisien parameter 0,502, *t-statistik* 3,843 ($p=0,000$), hipotesis ini diterima. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi aparaturnya berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Sesuai dengan *Stewardship Theory*, aparaturnya yang kompeten dan berintegritas akan mengelola dana secara transparan dan akuntabel, serta menghasilkan laporan keuangan yang andal. Meskipun aparaturnya di Kecamatan Cibodas menunjukkan kompetensi yang sangat baik, penting untuk terus meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta konsistensi penegakan sanksi. Kompetensi aparaturnya dalam penggunaan sistem informasi akuntansi, seperti yang ditekankan oleh Nurbaeti dkk. (2023), berperan krusial dalam menghasilkan laporan keuangan yang kredibel. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Kurniawan dkk. (2024), Supit & Lumingkewas (2023), Djamiraga & Widajantie (2022), dan Dewi & Dewi (2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* dana Kelurahan, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran dan program meningkatkan kepercayaan serta pengawasan masyarakat.
2. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* dana Kelurahan, menandakan bahwa pertanggungjawaban yang jelas dari aparaturnya berkontribusi pada kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, serta mencegah penyalahgunaan dana.
3. Kompetensi Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* dana Kelurahan, menunjukkan bahwa aparaturnya yang profesional dan berintegritas adalah fondasi

penting dalam mengelola dana kelurahan secara efektif dan membangun kepercayaan publik.

Saran

1. Bagi Penulis: Penelitian ini memperkaya wawasan penulis dalam akuntansi sektor publik dan *good governance*, serta memberikan pengalaman langsung dalam metode kuantitatif dan analisis data. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi ilmiah dan bekal karier.
2. Bagi Instansi Pemerintah: Pemerintah, khususnya kelurahan dan kecamatan, disarankan untuk meningkatkan transparansi informasi publik, meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan, dan mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk pengelolaan dana yang akuntabel.
3. Bagi Lingkungan Akademik: Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik akuntansi sektor publik, menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi, serta mendorong pengembangan kurikulum dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk memperluas cakupan penelitian (wilayah, objek, atau variabel tambahan seperti partisipasi masyarakat), menggunakan pendekatan kualitatif atau campuran, dan mengembangkan model evaluasi *good governance* yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Assa, C. M. D., Lopian, M., & Singkoh, F. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sendang Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–12.
- Aulia, L. S., Setiawan, A. B., & Melani, M. M. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Terhadap Good Governance Pada Zis Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Revenue*, 4, 137-148
- Fadillah, M. I., & Sembiring, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1360–1376. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.7297>
- Gamal, M. S. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Di Kantor Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *Ensains Jjournal*, 2(2), 162–171.
- Ghozali, H. . (2018). *Metodologi Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis* (E. Kedua (ed.)). PT Raja Grafindo Persada.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Richter, N. F., & Hauff, S. (2017). *Partial Least Squares Struktural Equation Modeling (PLS-SEM)*: United States Of America: Sage Publications, Inc.
- Hariadin, & Rais, M. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau. *Entries : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UM Buton*, 4(2), 2747–2779.
- Hasanah, N. A. F. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor. In Media.
- Jayanti, O. D. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota, Kota Kediri. *Policy and Maritime Review*, 78(2), 78–89.
- Juwanti, A. N., Santoso, S., & Rahayu, E. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 20 (1), 47–55.
- Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2012). Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur

- Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 160–171. <https://doi.org/10.4135/9781446216415.n11>
- Kusumasari, B., Dwiputrianti, S., & Allo, E. L. (2015). *Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabat Golongan III*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Terhadap Pengelolaan dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Bussines and engineering*, 1, 118-130
- Nurbaeti, E., Hambani, S., Aziz, A. J., & Anwar, S. (2023). Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal : Kajian Pada Efektivitas Pengelolaan Piutang. *Jurnal Akunida*, 9(2), 128–136. <https://doi.org/10.30997/jakd.v9i2.10329>
- Nurkhasanah, A. (2019). Pengukuran Kompetensi Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*.
- Pattylima, L. J., Marlien, T. L., & Waworundeng, W. (2018). Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan(Suatu Studi Di Kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
- Qak, M., & Holifah, N. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Di Kelurahan MAde Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(1).
- Rahmayanti, E., Murni, & Azhari. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Renyowijoyo, P. H. M., & Drs., AK., MM., P. (2012). *Akuntansi Sektor Publik (3rd ed.)*. Mitra Wacana Media.
- Rizal, N. A. A., & Hermanto, S. B. (2019). Peran Komitmen Organisasi Memediasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 2–16.
- Robial, D. F. (2019). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe). In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1, pp. 1–14). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/12345678/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Rusdin, & Pardana, D. (2022). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota BauBau. *Jurnal Multidispliner Kapalamda*, 4194(32), 137–156.
- Sempo, J. S., Laloma, A., & Londa, V. Y. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 61–73. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/30616>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. M. C. (2023). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Pegawai terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 12–20.
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi Dan Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.

Viani, S. D. L., & Jaeni. (2024). *stVilage Fund Management Affecting Factors (Case Study In Village Of Jeparu District)*. 7, 5001–5009.